

# Analisis Kinerja Monitoring Dan Evaluasi di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Studi Di Bappelitbangda Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat)

M. Rio Qisthi<sup>1</sup>, Pandoyo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Magister Ilmu Administrasi STIAMI, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia.  
E-mail : <sup>1</sup>rioqisthi@gmail.com, <sup>2</sup>p.pandoyo@gmail.com

\*Corresponding author

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

**Keywords**  
Monitoring;  
Evaluasi;  
Pembangunan Daerah.

Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah kurang optimalnya kinerja monitoring dan evaluasi di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan (Bappelitbangda) Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring, hambatan, dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja di Bappelitbangda Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan teori Willian N. Dunn yang diukur melalui efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melibatkan 15 informan diantaranya melaksanakan langsung proses monitoring dan evaluasi tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara dan pengkajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata kinerja monitoring dan evaluasi pada Bappelitbangda sebesar 3.8/5 yang terbilang cukup. Dalam penelitian ini, diharapkan tindak lanjut dari Bappelitbangda agar dapat mengoptimalkan kinerja monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan untuk membangun Pembangunan Daerah.

This is an open access article under the [BY-NC-SA](#) license.

## PENDAHULUAN

Pemerintah Pusat untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah-daerah supaya mengatur kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal, dan sebaliknya jika daerah membentuk kebijakan baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya harus memperhatikan kepentingan nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan titik awal adanya otonomi daerah. Secara konsepsional pemberian otonomi yang luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan serta pemberdayaan pada masyarakat. Di samping itu melalui otonomi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wujud daripada pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat adalah melalui pembangunan, dimana pembangunan itu sendiri berlandaskan pada potensi serta keadaan masyarakat dan wilayahnya sebagai faktor penunjang pembangunan suatu daerah. Di dalam pembangunan itu sendiri penting sekali yang namanya perencanaan pembangunan, suatu pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila memiliki sebuah perencanaan yang baik dan terarah pada visi bersama serta mampu mengakomodir kepentingan dari masing-masing stakeholder misalnya masyarakat, swasta dan pelaku pembangunan yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tersebut. Maka dari itu dibentuklah suatu instansi yang namanya Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah atau yang di singkat Bappelitbangda.

Bappelitbangda merupakan badan yang bergerak sebagai lembaga teknis daerah di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala

badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Monito ring dan Evaluasi diperlukan untuk menata dan mengatur kegiatan yang dikerjakan sehingga kegiatan yang dijalankan berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedurnya. Dalam hal ini diperlukan analisis dan rincian data kegiatan yang sudah dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Ini berguna agar kegiatan yang dikerjakan tetap dalam ritme dan tidak melenceng kearah yang tidak seharusnya. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang. Perencanaan yang baik juga akan menghasilkan keputusan atau hasil yang baik juga

Kegiatan pembangunan daerah yang dimonitoring dan evaluasi salah satunya yaitu kegiatan bersumber dana Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan tersebut terjadi karena kerjasama antara provinsi DKI Jakarta dengan Kota Bekasi. Dengan letak yang berdekatan memungkinkan hal tersebut dapat terjadi. Kegiatan ini berlangsung sebagai bentuk kompensasi Provinsi DKI Jakarta kepada Kota Bekasi. Kecamatan Bantargebang merupakan titik tempat lokasi pembangunan tersebut dilaksanakan. Berbagai sektor pembangunan mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi dan yang terpenting pembangunan lingkungan hidup diimplementasikan disana dimana letak pembangunan berjalan disitu terjadi monitoring dan evaluasi kegiatan. Agar kegiatan pembangunan berjalan dengan baik dan lancar, perlu diawasi dan di evaluasi setiap kegiatan yang sedang berjalan. Berikut contoh beberapa kegiatan bantuan bersumber dana Provinsi DKI Jakarta yang ada di Kota Bekasi:

GAMBAR I

No.	USULAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
					KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
1	Penataan Pedestrian Jalan Pangkalan 5 Tahap 1	Terlaksananya Penataan Pedestrian Jalan Pangkalan 5 Tahap 1	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	3.170.599.000,00	2.513.171.400	100,00
2	Peningkatan Jalan H. Djole Kel. Bantargebang	Terlaksananya Peningkatan Jalan H. Djole Kel. Bantargebang	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	1.094.890.000,00	1.002.705.600	100,00
3	Rehabilitasi Saluran Air Jalan Service Kel. Ciketing Udik	Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Air Jalan Service Kel. Ciketing Udik	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	1.122.940.000,00	1.016.358.000	100,00
4	Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Bantargebang	Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Bantargebang	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	4.000.000.000,00	3.677.375.000	100,00
5	Pembangunan Saluran Jalan Narogong Kel. Cikiwul	Terlaksananya Pembangunan Saluran Jalan Narogong Kel.	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya	1.008.764.221,00	836.283.000	100,00
6	Pembangunan Turap dan Perbaikan Jalan Pangkalan 1	Terlaksananya Pembangunan Turap dan Perbaikan Jalan	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya	9.868.723.028,00	9.073.650.000	100,00
7	Pembangunan Jembatan Jalan Pangkalan VI	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Jalan Pangkalan VI	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	3.000.000.000,00	2.707.875.700	100,00
8	Penyusunan FS dan DED Landfill Mining TPA Sumur Batu	Terlaksananya Penyusunan FS dan DED Landfill Mining TPA Sumur Batu	Dinas Lingkungan Hidup	1.411.571.000,00	0	0,00
9	Penyusunan DED TPS3R	Terlaksananya Penyusunan DED TPS3R	Dinas Lingkungan Hidup	292.296.000,00	248.798.750	100,00
10	Pengurangan Sampah Residu melalui TPS3R	Terlaksananya Pengurangan Sampah Residu melalui TPS3R	Dinas Lingkungan Hidup	2.707.704.000,00	460.534.000	17,00
11	Pengadaan Bak Kontainer	Terlaksananya Pengadaan Bak Kontainer	Dinas Lingkungan Hidup	2.000.000.000,00	1.962.440.000	100,00
12	Pengadaan Kendaraan Operasionaln Angkutan Sampah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Operasionaln Angkutan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	2.400.000.000,00	2.222.090.000	100,00

Sumber: data Bappelitbangda AP4EP

Kegiatan diatas sebagai contoh dari pembangunan Kota Bekasi yang dibantu oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bappelitbangda sebagai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi menganalisa, monitoring, mengevaluasi dan menyusun dokumen rencana kerja kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada

Selain itu, berikut merupakan informasi keterlambatan pengumpulan data kegiatan pembangunan daerah

**Tabel I**

Keterlambatan Pengumpulan Data Kegiatan Pembangunan Daerah	
2019	29 dari 53 kegiatan terlambat
2020	38 dari 62 kegiatan terlambat
2021	37 dari 51 kegiatan terlambat
2022	25 dari 58 kegiatan terlambat
2023	14 dari 53 kegiatan terlambat

Sumber: Bappelitbangda

Parameter keterlambatan pengumpulan data diatas yaitu waktu yang sudah ditentukan sudah melewati batas waktu. Kegiatan yang melebihi batas waktu pengumpulan data ditentukan oleh Bappelitbangda untuk dilaksanakan oleh perangkat daerah pelaksanaan kegiatan. Beberapa kegiatan yang dimonitoring dan evaluasi terdapat kekurangan, kelemahan dan kendala yang terjadi. Beberapa permasalahan tidak hanya terjadi dalam eksternal pembangunan, tetapi internal. Manajemen monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih terbilang belum optimal dikarenakan masih terjadi ketidaksesuaian kegiatan yang dilaksanakan, waktu pekerjaan yang tidak selesai sesuai jadwal dan terjadi perbedaan output kegiatan. Banyak faktor yang menghambat kegiatan pembangunan daerah tersebut dinilai dari tingkat keberhasilan kerja program dan kegiatan yang belum maksimal. Kendala setiap tahun berbeda setiap tahunnya. Berbagai macam kondisi dan situasi yang terjadi di setiap tahun memungkinkan proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan berganti sistem dan manajemennya.

Pemusatan pembangunan daerah yang dilaksanakan di suatu tempat mungkin terbilang cukup membantu pemantauan dan monitoring pekerjaan tersebut. Sehingga ruang lingkup lokasi yang diawasi hanya di wilayah itu saja. Tetapi banyaknya kegiatan pembangunan juga harus memiliki sumber daya yang banyak untuk memudahkan tugas monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan juga menyangkut berbagai unsur seperti warga sekitar, lembaga, perangkat daerah terkait dan pekerja pembangunan. Tidak mudah melaksanakan kegiatan jika warga setempat tidak menyetujui kegiatan yang akan dibangun disana. Ini merupakan tantangan tersendiri untuk meyakinkan warga setempat untuk ikut bekerjasama membangun kegiatan pembangunan daerah di lokasi tempat mereka menjalani kehidupan sehari-hari.

**Tabel II Realisasi Penerimaan Anggaran Kegiatan Kota Bekasi**

No	Tahun	Pagu Anggaran	Jumlah Kegiatan	Persentase Penyelesaian Kegiatan
1	2019	323.740.980.100	53	89,2%
2	2020	406.722.313.560	62	72,8%
3	2021	379.588.502.200	51	81,7%
4	2022	365.838.788.250	58	82,3%
5	2023	356.446.480.500	53	86,4%

Sumber: Bappelitbangda SIBANDEK 2023

Dilihat dari persentase penyelesaian kegiatan, terdapat penurunan persentase kinerja kegiatan di tahun 2020 karena ada pandemi *Covid-19* yang menyebabkan perubahan global. Banyaknya kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2020 dengan perubahan manajemen kerja yang diminimalisir drastis menjadikan kegiatan pembangunan daerah menurun. Keterbatasan waktu dan terhambatnya segala proses yang dilaksanakan menjadi kendala utama terjadinya perlambatan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Bantargebang adalah sebuah kecamatan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan ini sendiri dimekarkan dari kecamatan Setu pada tanggal 24 Desember 1981 melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 1981. Mayoritas masyarakat Bantargebang berprofesi sebagai buruh, kecuali di

kelurahan Sumur Batu yang didominasi oleh petani karena banyaknya sawah. Di kecamatan ini terdapat lokasi penampungan sampah akhir yang dikenal sebagai TPST Bantargebang yang ditujukan untuk menampung seluruh sampah atau limbah dari DKI Jakarta yang telah beroperasi sejak tahun 1985. Pada awalnya Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan wilayah Ujungmenteng di Jakarta Timur sebagai lokasi penampungan akhir, atas berbagai kajian, Ujungmenteng batal menjadi lokasi dikarenakan wilayahnya yang sudah padat. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta yang dibantu oleh pemerintah pusat mencarikan lokasi lain di wilayah Jawa Barat. Pada saat itu, Gubernur Jawa Barat, Yogie Suardi Memet menawarkan tiga lokasi, antara lain Citeureup di Kabupaten Bogor, kemudian Bantargebang (saat itu) di Kabupaten Bekasi dan Setu (saat itu) di Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 102 tahun 2021, Bappelitbangda juga memiliki tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah pada fisik dan infrastruktur wilayah, perencanaan makro, monitoring, evaluasi dan pelaporan, ekonomi dan sosial budaya, penelitian dan pengembangan. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian saat ini yakni ketidaksesuaian kegiatan pembangunan daerah dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang dilakukan. Sehingga menjadi tantangan bagi Bappelitbangda untuk melakukan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan prosedur sehingga terciptanya pembangunan daerah yang efektif dan efisien

## KAJIAN PUSTAKA

Nor Ghofur (2014) menjelaskan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Manajemen Publik Menurut Shafritz dan Russel (dalam Kebab, 2008:93) diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi.

Menurut Overman dalam Kebab (2004:85) mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah *scientific management*, meskipun sangat dipengaruhi oleh *scientific management*. Manajemen publik bukanlah *policy analysis*, bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi politik kebijakan di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing* dan *controlling* satu sisi, dengan Sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.

Menurut Handoko (2009:23) manajemen adalah proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam suatu organisasi diperlukan manajemen untuk mengatur proses penyelenggaraan organisasi hingga tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Pada instansi pemerintah khususnya menyangkut soal pelayanan publik, diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pelayanan agar tujuan dari pelayanan itu sendiri yakni kepuasan masyarakat dapat tercapai.

Perencanaan Pembangunan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara. Bahkan sebagian mengatakan bahwa dengan adanya perencanaan pembangunan memberikan keyakinan yang kuat dalam keberhasilannya. Perencanaan pembangunan pada hakikatnya adalah upaya untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan yang selaras dengan tujuan yang tercantum dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Perencanaan pembangunan secara terpusat dipercaya oleh kalangan luas sebagai mekanisme kelembagaan dan organisasi yang penting, guna mengatasi berbagai rintangan utama dalam proses pembangunan serta menjamin tercapainya tingkat pertumbuhan yang baik. Untuk mengejar ketertinggalan tentu dibutuhkan suatu perencanaan pembangunan nasional secara komprehensif. Sebuah kerangka kebijakan pembangunan yang komprehensif dapat memainkan peran penting dalam memacu pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan.

Zaenal Mukarom (2015) dalam Perpustakaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjelaskan bahwa manajemen pelayanan merupakan proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi

tercapainya tujuan pelayanan. Manajemen pelayanan publik dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan publik sebagai pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat, sehingga memenuhi aspek pelayanan publik, yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, memiliki kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban

Johanes Basuki dan Risnanto (2013) dalam buku berjudul “Budaya Pelayanan Publik” mengutip bahwa pelayanan publik yang rendah juga mengakibatkan turunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan lebih jauh tingkat kepercayaan kepada pemerintah menjadi rendah. Akibatnya dapat kita lihat sekarang, yakni sikap apatis, tidak menghormati hukum karena pelayanan hukum dianggap telah menderai hak asasinya, tidak respek terhadap aparat penegak hukum, karena para penegak hukum tidak berpihak kepada masyarakat, tidak menghormati dan patuh pada birokrasi pemerintah karena aparatur pemerintah selain dianggap korup juga tidak netral. Rendahnya kualitas pelayanan publik juga berakibat luas lagi yaitu peringkat daya saing yang makin rendah dibandingkan dengan negara lain, bahkan dengan negara-negara yang baru pun jauh tertinggal. Pengaruhnya, para investor enggan menanamkan modalnya, dan seandainya mau maka dengan meminta persyaratan tertentu. Pengaruh lebih besar lagi adalah banyaknya pengangguran, karena minimnya lapangan kerja sebagai akibat rendahnya sektor bisnis. Bahkan para pengusaha lokal turut membuka pabrik dan sejenisnya di luar negeri, karena iklim usaha di dalam negeri dirasakan belum kondusif.

Monev adalah singkatan dari monitoring dan evaluasi di mana monitoring adalah proses pengumpulan dan menganalisis informasi secara berkelanjutan dari penerapan suatu program atau kegiatan untuk mengetahui apakah telah berjalan sesuai rencana, sementara itu evaluasi berarti penilaian berskala terhadap relevansi, efisiensi, dan dampak dari suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian, monitoring adalah proses analisis dan pengawasannya, sementara evaluasi merupakan penilaian berdasarkan analisis atau monitoring yang telah dilakukan. Mangkunegara (2011: 15) menjelaskan bahwa penilaian kinerja adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang pekerja melakukan tanggungjawabnya atau tidak. Dijelaskan juga bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi pekerja mencapai prestasi yang lebih tinggi yaitu kemampuan individu dan motivasi dari pimpinan.

*UNESCO Regional Office for Education in Asia and The Pasific*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan monitoring adalah upaya yang dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi pelaksanaan dari berbagai komponen program sebagaimana telah direncanakan, waktu pelaksanaan program sebagaimana telah dijadwalkan dan kemajuan dalam mencapai tujuan program. Tujuan utama dari monitoring adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana program.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Selanjutnya dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Nurrohman Wijaya (2019) menjelaskan bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan evaluasi dilakukan secara tepat dan lebih terukur, maka proses penyusunan kegiatan harus memenuhi kaidah *logical framework* atau Kerangka Kerja Logis (KKL). Menurut Nurrohman Wijaya (2019), Evaluasi proses pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan program/kegiatan secara mendalam. Deskripsi proses pelaksanaan, meliputi deskripsi pelaksanaan (siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana), deskripsi latar belakang, deskripsi organisasi, deskripsi input, output dan aktivitas pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan. Evaluasi proses pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan terhadap program/kegiatan terpilih, antara lain untuk memahami fungsi-fungsi pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan dengan baik dan mana yang tidak, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang.

## **METODE PENELITIAN**

Mengingat obyek dari penelitian ini adalah manusia yaitu para pelaku/pelaksana perencanaan

pembangunan, peneliti merasa lebih tepat jika menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Moloeng (2017) memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif. Paradigma interpretatif lebih menekankan pada makna atau interpretasi seseorang terhadap sebuah simbol. Tujuan penelitian dalam paradigma ini adalah memaknai (*to interpret* atau *to understand*, bukan *to explain* dan *to predict*) sebagaimana yang terdapat dalam paradigma positivisme. Untuk penelitian ini, peneliti menetapkan jumlah Informan sebanyak 15 orang sdi lingkungan Bappelitbangda Kota Bekasi. Teknik Penentuan Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling*, peneliti memilih sumber data berdasarkan pada fokus dan situasi yang terjadi sesuai dengan tujuan fokus tersebut. Kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah mereka yang memahami detail mengenai monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Hasil analisis deskriptif data jawaban responden mengenai monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah di Bappelitbangda Kota Bekasi untuk setiap pernyataan, terdapat beberapa perbedaan pendapat masing-masing responden. Penulis mengambil bobot nilai dengan merangkum semua jawaban responden sebagai berikut :

- 5 = sangat baik
- 4 = baik
- 3 = cukup
- 2 = kurang baik
- 1 = tidak baik

Hasil angka maksimal dalam pertanyaan yaitu 5, sedangkan hasil minimal yaitu 1. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang yang dipilih sesuai dengan kapasitas dan tugasnya. Bobot nilai yang digunakan dalam pertanyaan yaitu berapa jumlah nilai kinerja monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kota Bekasi dalam rangka pembangunan daerah yang dilaksanakan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai rata-rata seluruh jawaban dari informan merupakan nilai yang dipakai dalam pembobotan.

**Tabel IV Pembobotan Nilai**

No	Nama	Jabatan	Jawaban	Nilai
1.	Drs. Dinar Faizal	Kepala Dinas	monev sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan	4
2.	Selamat Gunawan, AP, M.Si	Kepala Bidang AP4EP	secara keseluruhan sudah baik hanya perlu ditingkatkan penyesuaian jadwal kegiatan	4
3.	Bobby Yustian, M.Si	Kepala Bidang IPW	perlu dipercepat agar tepat waktu, kinerja sudah baik	4
4.	Helmy, A.md, LLAJ, S.E	Kepala Bidang Esda	kinerja monev sudah maksimal	5
5.	Robby A.P, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Litbang	pelaksanaan kinerja sudah baik perlu diteliti lagi dokumen perencanaannya	4
6.	Mahmud, S.E	Perencana Ahli Muda	kertas kerja baik, evaluasi di lapangan harus ditingkatkan	4
7.	Dede Kurniawan, S.T,M.T	Perencana Ahli Muda	masih kurang optimal karena ada ketidaksesuaian rencana kerja dengan dokumen perencanaan	3

8.	Lutfi Hanifah, S.T, M.Se	Perencana Ahli Muda	sudah baik, tingkatkan koordinasi dengan dinas terkait agar pelaksanaan bisa lebih cepat	4
9.	Wendrian Fadli, S.Si	Pelaksana Monev	Kinerja belum menyeluruh karna tugas yang dibagi tidak merata	3
10.	D. Yudha A.S, S.E	Pelaksana Monev	Monev kurang efektif karena pelaksanaan evaluasi memakan waktu yang cukup lama	3
11.	Irawan Lukito Agung, S.E	Pelaksana Monev	kertas kerja baik, evaluasi di lapangan harus ditingkatkan	4
12.	Firman Purnomo, S.Kom	Pelaksana Monev	monev sudah sesuai SOP dengan segala aturan yang berlaku	5
13.	Djoko Wiratmoko, S.T	Pelaksana Monev	keluhan atas evaluasi dilapangan terkait percepatan pembangunan perlu di respon secepatnya	3
14.	Neni Fitriani S.E	Pelaksana Monev	pelaksanaan monev cukup baik hanya perlu ditingkatkan koordinasinya	4
15.	Eka Setia Nensih, S.E	Pelaksana Monev	sudah sesuai hanya target yang dicapai belum maksimal, perlu ditingkatkan	4
Rata – rata				3.8

sumber: data informan

Berdasarkan hasil perhitungan nilai diatas diketahui nilai paling tinggi sebesar 5 dan paling rendah sebesar 3. Nilai maksimal 5 (sangat baik) dinilai oleh 2 orang, diikuti nilai 4 (baik) sebesar 9 orang, dan nilai 3 (cukup) sebanyak 4 orang. Nilai rata-rata keseluruhan mencapai 3,8 yang artinya masih dalam kategori cukup. Diketahui bahwa ke 6 aspek yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan masih menjadi penyebab kurang optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di Bappelitbangda. Hal ini diketahui dari nilai rata-rata 3,8 yang masih dalam kategori cukup. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dan menyusun menggunakan rumus rata rata dari Supranoto (2001:14) yaitu:

$$\pi = \sum_{i=1}^n xi p (xi)$$

$\pi$  = rata rata

$xi$  = nilai ke  $i$  dari variabel acak  $x$

$\Sigma$  = banyak data dari 1 sampai  $n$   $p(xi)$  = probabilitas terjadinya  $x$

Rata-rata adalah jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data (Sekaran, U & Bougie, R.J, 2016). Dari hasil diatas ditemukan nilai rata – rata yang dikategorikan sebagai hasil yang cukup. Ini menunjukkan bahwa kinerja monitoring dan evaluasi Bappelitbangda masih belum optimal. Terdapat beberapa penjelasan dan masalah yang ditemukan berbeda dari setiap informan. Nilai rata-rata 4,5 merupakan target kinerja monitoring dan evaluasi di Bappelitbangda, sedangkan yang terjadi nilai dalam bobot penilaian informan hanya sebesar 3,8.

Penyebab pertama kurang optimalnya kinerja monitoring dan evaluasi di Bappelitbangda Kota Bekasi adalah pernyataan dari informan yang memberi pernyataan “Monitoring dan Evaluasi di Bappelitbangda masih kurang optimal karena ketidaksesuaian rencana kerja dengan dokumen perencanaan”. Penyebabnya adalah masih ada keluhan terkait dokumen perencanaan yang tidak sesuai dengan dokumen awal perencanaan.

Penyebab kedua yaitu pernyataan “Kinerja belum menyeluruh karna tugas yang dibagi tidak merata”. Penyebabnya yaitu pembagian tugas monitoring dan evaluasi kurang merata dikarenakan SDM yang kurang banyak dibandingkan dengan jumlah kegiatan pembangunan daerah.

Penyebab ketiga yaitu “Monev kurang efektif karena pelaksanaan evaluasi memakan waktu yang cukup lama” yang disebabkan kinerja monitoring dan evaluasi suatu kegiatan memakan waktu lama

sehingga pelaksanaan monev terbilang tidak efektif.

Penyebab keempat yaitu “keluhan atas evaluasi dilapangan terkait percepatan pembangunan perlu di respon secepatnya”, yang berarti respon tim monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan evaluasi kinerja masih terbilang lambat yang menyebabkan terlambatnya penyelesaian suatu masalah yang ada. Informan tersebut juga menyatakan nilai dari monitoring dan evaluasi pada Bappelitbangda sebesar 3/5 (tiga dari skala lima) atau cukup. Dari informasi diatas, kinerja monitoring dan evaluasi Bappelitbangda dapat disimpulkan belum optimal dilaksanakan. Terdapat beberapa faktor dari informan yang menyimpulkan jika proses monitoring dan evaluasi belum optimal.

## **Hasil Pembahasan**

### **a. Solusi agar Kinerja Monitoring dan Evaluasi di Bappelitbangda menjadi Optimal**

Berdasarkan hasil dari jawaban informan diketahui bahwa kinerja monitoring dan evaluasi di Bappelitbangda mendapat nilai rata-rata 3.8/5 (tiga koma delapan dari skala lima) atau cukup. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaannya. Dari jawaban para informan diketahui bahwa hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang belum optimal yaitu agar dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Bappelitbangda terkait monitoring dan evaluasi sehingga apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dapat dipahami dengan optimal dan menjalankan secara tepat. Hal yang perlu diperbaiki yaitu tingkat pemahaman tim monitoring dan evaluasi perlu ditingkatkan sehingga mampu menguasai hal hal yang menjadi perhatian dalam memecahkan masalah yang terdapat dalam kinerja monev tersebut. Pendidikan latihan, workshop dan penajaman skill monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan oleh tim monev sehingga pemahaman dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal. Tujuan dalam pelaksanaan diklat tim monev agar skill, koodinasi, kepekaan dan tingkat pemahaman untuk memonitoring dan evaluasi yaitu meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam proses monev tersebut. Peningkatan kapasitas dan skill aparatur sangat penting dikuasai aparatur Bappelitbangda agar proses monitoring dan evaluasi dapat berjalan lancar dengan cepat.

### **b. Solusi agar Kinerja Monitoring dan Evaluasi di Bappelitbangda Merata**

Penyebab kedua yaitu kinerja monitoring dan evaluasi belum menyeluruh karna tugas yang dibagi tidak merata yaitu dikarenakan jumlah tim monev perlu ditambah agar sebanding dengan jumlah kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan. Dapat dilihat dari nilai rata-rata keseluruhan jika kinerja monitoring dan evaluasi Bappelitbangda terbilang cukup atau kurang maksimal. Intensitas pekerjaan yang diberikan tidak seimbang dengan waktu yang ditetapkan, jadi perlu ditambah sumber daya manusia pada tim monev tersebut agar terlaksana menyeluruh dan optimal. Bappelitbangda perlu menambah sumber daya manusia agar tim monitoring dan evaluasi dapat melaksanakan tugas secara menyeluruh dengan efektif. Evaluasi dari tahun sebelumnya jika pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan selesai tidak tepat dengan waktu yang dijadwalkan. Penyebab keterlambatan pelaporan data monitoring dan evaluasi biasanya karena waktu. Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dari analisis, pengumpulan data, evaluasi sampai pelaporan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga dibutuhkan lebih banyak jumlah Sumber Daya Manusia dalam tim. Jika jumlah aparatur sebanding dengan jumlah kegiatan yang di monev maka keterlambatan waktu pelaporan data bisa diatasi mengingat jumlah aparatur yang sesuai dapat membantu proses kolektif data menjadi lebih cepat.

### **c. Solusi agar Kinerja Monitoring dan Evaluasi Berjalan Efektif**

Berdasarkan paparan dari informan, dikatakan bahwa kinerja monitoring dan evaluasi Bappelitbangda masih belum efektif dikarenakan proses evaluasi kegiatan berlangsung lama. Hal ini disebabkan karena dokumen rencana kerja harus disinkronkan dengan perencanaan awal dimana terdapat beberapa perbedaan yang harus dievaluasi dan dicari solusinya. Terdapat beberapa hal yang harus dikaji terlebih dahulu sebelum menyelesaikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. diperlukan sebuah sistem aplikasi untuk mengumpulkan data secara satu pintu agar tidak terjadi perbedaan dokumen rencana kerja. Dokumen kerja sudah ditetapkan diawal oleh semua pihak sehingga proses monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan lancar, tetapi situasi dan kondisi di lapangan memungkinkan terjadi perubahan rencana kerja. Kegiatan monitoring dan evaluasi perlu dituangkan dalam aplikasi sehingga memudahkan proses kolektif data dan penginputan data secara online. Di zaman yang serba modern ini perlu adanya sebuah aplikasi untuk memudahkan kegiatan pemerintahan dengan data *realtime* yang bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang dibuat secara manual karena data disimpan dalam aplikasi online tersebut.



#### d. Solusi agar Kinerja Monitoring dan Evaluasi Merespon dengan Cepat

Merespon sesuatu dengan cepat tentu sangat dibutuhkan dalam setiap pelayanan masyarakat. Tim monitoring dan evaluasi Bappelitbangda merupakan contoh dari pelayan masyarakat yang terdapat di bidang pembangunan. Informan menyatakan jika keluhan yang terdapat pada suatu kegiatan pembangunan daerah belum direspon dengan cepat. Koordinasi yang belum terlaksana dengan baik mengakibatkan hal seperti ini dapat terjadi. Koordinasi perlu diperbaiki agar respon cepat terhadap suatu masalah dapat melancarkan proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan. Mengingat nilai rata-rata yang didapat yaitu 3.8/5 (tiga koma delapan dalam skala lima) yang berarti cukup atau terbilang belum optimal. Kesalahan pada umumnya terjadi karena kesalahpahaman yang menyebabkan proses kegiatan berjalan terhambat. Jalur komando dari atas kebawah harus direncanakan dengan matang agar tidak terjadi *misscoordination* atau kesalahpahaman. Sering terjadi pengambilan keputusan tanpa dimusyawarahkan ke sesama tim ataupun kepada pimpinan. Dibutuhkan metode *Forum Group Discussion* (FGD) dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan semua pihak agar informasi yang didapat lebih valid.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Bappelitbangda Kota Bekasi masih belum optimal. diperlukan peningkatan kapasitas aparatur Bappelitbangda terkait monitoring dan evaluasi sehingga apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dapat dipahami dengan optimal dan menjalankan secara tepat
2. Beberapa faktor penghambat proses monitoring dan evaluasi Bappelitbangda Kota Bekasi yaitu belum ada sistem aplikasi yang menangani proses monev secara digital, jumlah SDM yang terbatas, keterlambatan pengumpulan data serta kurangnya koordinasi antar tim monitoring dan evaluasi.
3. Tindak lanjut setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja di Bappelitbangda diharapkan agar pelaksanaan dilaksanakan secara optimal dan efisien. Pembuatan sistem aplikasi secara online dapat mengatasi keterlambatan waktu pengumpulan data yang dilakukan secara manual. Penambahan Sumber Daya Manusia sangat membantu pelaksanaan monev agar lebih cepat dilaksanakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ajizah, Siti Nur (2021) Legal Reasoning Vol. 4 No. 1 Desember. Bappeda Kota Depok.  
Azis, R. (2016). Pengantar administrasi pendidikan. Yogyakarta: Penerbit Sibuku.
- Asmana, Abi (2019). <https://legalstudies71.blogspot.com/>
- Cengkareng Jakarta Barat. Jakarta 2021
- Creswell. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design, Second Edition, New Delhi: SAGE Publication,
- Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Mangkunegara, Prabu dan Anwar AA. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung:Remaja Rosdakarya
- Fahmi, Irham. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta
- Maryanto, Evaluasi Kinerja Kegiatan Dalam Pelayanan Publik Di Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta. STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, 2019
- Moleong, L.J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Safi'I, H. M. 2009. Perencanaan Pembangunan Daerah. Malang : Averroes Press.
- Saladien (2006). Rancangan Penelitian Kualitatif. Modul Metodologi Penelitian Kualitatif, Disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Kualitatif Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, 6-7 Desember.
- Sekaran, U. & Bougie, R.J, (2016). Research Methods for Business: A skill Building Approach. 7<sup>th</sup> Edition, John Wiley & Sons Inc. New York, US

- Simanjuntak, A., & Amp; Silitonga, I. (2020). Pengaruh Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk peningkatan Kualitas Perencanaan Partisipatif Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat). *Methodika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 3(2), 97–112. <https://doi.org/10.46880/jsika.v3i2.43>
- Suhardan, D., Suharto, N., Irianto, Y.B. (2017). *Manajemen pendidikan*. Bandung: Alfabeta. Suparman, (2021). *Evaluasi Atas Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pajak Reklame di Kecamatan*
- Todaro, Michael P & Stephen C. Smith. 2010. *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesembilan. Jakarta : Erlangga
- Wijaya, Nurrohman. 2019. *In House Training. KK Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Kebijakan*. Institut Teknologi Bandung. [bappeda.jabarprov.go.id](http://bappeda.jabarprov.go.id)
- William N. Dunn 2014, *Analisis Kebijaksanaan Publik*, alih bahasa Darwin Muhadjir, Yogyakarta, Hanindita